

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN METODE ANALISIS *LOCATION QUOTIENT* (LQ) DI KABUPATEN BIREUEN

Marisa Saputri¹, Fitrah Afandi², Muhammad Adnan³, Rachmi Meutia⁴

^{1,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Email: fitrahfandi@usk.ac.id

Abstract

One of the strategies that can encourage economic growth is by prioritizing the base economic sectors in the planned development program to lead to better overall economic performance. This study aims to determine the leading sectors and non-leading sectors and to find out how changes and shifts in the economic sector in the Bireuen Regency area. The data in this study came from the Central Statistics Agency (BPS) using secondary data in the form of time series of the Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Bireuen Regency and Aceh Province in 2017-2021. This research method is descriptive quantitative with the analytical tool used, namely Location Quotient (LQ) Analysis, used to determine the basic sector (leading sector) and non-basic (non-leading sector) in the economy of Bireuen Regency. Based on LQ analysis, there are four sectors based on Bireuen Regency, namely: agriculture, forestry, and fisheries; sector water supply, waste management, waste, and recycling; the wholesale and retail trade sector, as well as the transportation and warehousing sector. While the sector with the smallest value is the water supply, waste management, waste, and recycling sector

Keyword: *Gross Regional Domestic Product (PDRB), Location Quotient (LQ)*

Abstrak

Salah satu strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memprioritaskan sektor-sektor ekonomi basis dalam program pembangunan yang direncanakan untuk mengarah pada kinerja perekonomian yang lebih baik secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dan sektor non unggulan serta untuk mengetahui bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di daerah Kabupaten Bireuen. Adapun data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (time series) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bireuen dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan alat analisis yang digunakan yaitu Analisis *Location Quotient* (LQ), yang digunakan untuk menentukan sektor basis (sektor unggulan) dan non basis (non unggulan) dalam perekonomian Kabupaten Bireuen. Berdasarkan analisis LQ, sektor basis Kabupaten Bireuen terdapat empat sektor, yaitu: sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor Perdagangan besar dan eceran, serta sektor transportasi dan pergudangan. Sedangkan sektor dengan nilai terkecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Kata Kunci: *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Location Quotient (LQ)*

PENDAHULUAN

Negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, menghadapi pandemi virus Corona. Pandemi COVID-19 mengancam sistem atau tatanan kehidupan masyarakat di segala bidang, salah satunya bidang ekonomi. Guncangan ekonomi yang berdampak secara global dimana ekonomi mengalami penurunan secara drastis. Kondisi perekonomian Indonesia yang terdampak COVID-19, antara lain: industri pengolahan berkontraksi 6,19%, perdagangan berkontraksi 7,57%, konstruksi berkontraksi 5,39%, akomodasi dan makan minum berkontraksi 22,02% (Kemenkeu 2022). Penanganan pandemi COVID-19 ikut mendorong perbaikan ekonomi domestik serta mampu menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Indonesia terus berupaya untuk terus memperkuat strategi pengendalian COVID-19 agar segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. Sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor Produk Domestik Bruto terbesar nasional. Hal ini tercermin dari *purchasing managers index* yang mencapai 53,7%, yang ditopang oleh kuatnya kinerja ekspor dan membaiknya *demand* domestik. Hingga saat ini, lapangan usaha yang masih bias untuk tumbuh positif adalah sektor pertanian, informasi komunikasi, jasa kesehatan dan pengadaan air (Kemenkeu 2022).

Sjafrizal (2012) mengatakan, ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah umum terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan keadaan demografi pada masing-masing wilayah. Karena itu, ada wilayah yang cenderung lebih maju (*developed region*) dan wilayah yang cenderung tertinggal (*underdeveloped region*). Hasil studi pertama yang dilakukan oleh Hendra Esmara (1975) dan diperkuat oleh Uppal, J.S. & Budiono Sri Handoko (1986) bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, bahkan diantara sesama negara berkembang. Ketimpangan tersebut relatif meningkat, hal ini dapat mengakibatkan kecemburuan sosial daerah tertinggal terhadap daerah maju. Menurut Sjafrizal (2012), ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah. Diantaranya adalah: perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi yang sangat tinggi di beberapa wilayah, serta tidak meratanya alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan produktifitas dari pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu negara. Todaro & Smith (2011) Pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, perubahan sikap

masyarakat, lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam membangun daerah diperlukan adanya perencanaan yang baik. Pembangunan ekonomi bukan hanya pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, seperti kepada sektor-sektor ekonomi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi tergambar pada pertumbuhan ekonomi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pusat pembangunan dan pusat pertumbuhan, pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan kegiatan ekonomi yang mampu mengembangkan sekumpulan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan pusat pembangunan adalah suatu kumpulan kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan struktur ekonomi maupun sosial dari dasar dan mampu mendorong proses pembangunan wilayah secara multidimensional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dan merupakan fenomena penting yang dialami oleh perekonomian seluruh dunia termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi disuatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi merupakan proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang berkembang termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Berdasarkan data PDRB kabupaten/kota se provinsi Aceh atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2017-2021, bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Bireuen masih terbilang rendah yaitu menempati urutan ke-16 se provinsi Aceh adalah sebesar 0,94 persen. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Bireuen didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha diantaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; konstruksi; serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sedangkan tiga kategori lainnya memberikan kontribusi yang hampir sama. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan dengan 609 desa yang memiliki potensi daerah yang berbeda-beda yang dapat menghasilkan suatu output ekonomi yang terlihat pada 17 sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bireuen dibawah ini.

Tabel 1
Laju pertumbuhan Kabupaten Bireuen ADHK 2010

Sektor Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.36	2.72	4.30	3.87	-0.66
Pertambangan dan penggalian	-2.62	-6.13	1.38	2.96	7.06
Industri pengolahan	2.72	4.08	2.13	-2.93	0.71
Pengadaan listrik dan gas	9.01	9.53	9.95	7.66	3.64
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	9.54	7.82	20.59	0.74	2.30
Konstruksi	5.54	6.43	6.55	6.31	1.01
Perdagangan besar dan eceran	5.50	6.65	5.41	-4.97	4.55
Transportasi dan pergudangan	1.38	0.92	3.56	-21.21	25.19
Penyediaan akomodasi dan makan minum	6.10	6.35	7.36	-3.62	0.19
Informasi dan komunikasi	1.99	1.73	3.78	11.86	8.23
Jasa keuangan dan asuransi	4.43	1.10	8.60	2.77	-1.28
<i>Real estate</i>	5.38	5.43	6.74	-0.55	3.10
Jasa perusahaan	5.08	5.24	5.11	3.20	1.93
Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7.05	6.74	5.08	-0.13	5.20
Jasa Pendidikan	6.85	6.16	7.38	2.47	1.56
Jasa kesehatan dan kegiatan social	7.12	6.91	7.14	6.01	9.83
Jasa lainnya	5.50	3.47	8.30	1.23	2.27
PDRB	4.23	4.22	5.00	-1.02	4.13

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2017-2021(data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun 2021 laju pertumbuhannya paling rendah dan mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar 0,66 persen. Pada dasarnya, jika pemerintah Kabupaten Bireuen memahami dengan benar potensi ekonomi apa yang dimiliki daerahnya dan dapat dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin PDRB Kabupaten Bireuen dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi, namun belum diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari pertumbuhan ekonomi yang ada belum diketahui sektor ekonomi apa saja yang memiliki potensi daya saing

kompetitif dan kompratif. Sehingga pertumbuhan yang ada hanya sebatas pada angka-angka kuantitatif saja. Oleh karena itu, Kabupaten Bireuen memerlukan perhatian khusus untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Ada beberapa jenis metode analisis untuk menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan dengan pendekatan matematis dapat digunakan di suatu wilayah, diantaranya adalah Koefisien Lokasi (*Location Quotient* atau *LQ*). Penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient* karena dengan alat analisis ini, akan semakin cepat menemukan potensi sektor unggulan di daerah yang ingin dikaji.

Berdasarkan teori-teori regional dan juga peraturan perundang-undangan otonomisasi daerah Nomor 32 Tahun 2004, bahwa yang menjalankan daerah dalam hal ini provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu mengelola potensi sumber daya daerah yang tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian perlu adanya perhatian serius untuk memahami sektor apa saja yang terus berkembang dan sektor apa saja yang mengalami kejenuhan. Dengan mengetahui sektor basis dan non basis dapat memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bireuen, maka dapat membantu pemerintah dalam mengelola kebijakan dalam hal ekonomi dan pembangunan daerahnya sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu dalam kaitannya, maka perubahan struktur ekonomi dan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bireuen adalah hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Berdasarkan permasalahan- permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai potensi pertumbuhan ekonomi. Dengan judul “Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Bireuen”

LANDASAN TEORI

Konsep Wilayah

Wilayah adalah suatu kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur yang terikat padanya yang dibatasi oleh aspek administratif atau aspek fungsional (Adisasmita, 2005). Dalam analisis ekonomi regional, ada beberapa konsep wilayah yang sering digunakan, yaitu:

- a. *Homogeneous Region* (wilayah homogen) adalah wilayah yang dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik (ciri) baik dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografi dan sebagainya. beberapa daerah dalam wilayah yang bersangkutan serta Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah: provinsi, kota, kabupaten dan desa.
- b. *Nodal Region* (wilayah nodal) yaitu suatu wilayah yang dibentuk dengan tujuan terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait yang

dibentuk berdasarkan keterikatan sosial dan ekonomi yang erat antar daerah. Yang termasuk ke dalam wilayah nodal adalah: JABODETABEK (kesatuan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

- c. *Planning Region* (wilayah perencanaan) adalah wilayah yang dibentuk untuk melakukan perencanaan pembangunan wilayah yang berada di bawah satu administrasi tertentu. Seperti: REPELITA (rencana pembangunan lima tahun) dan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah).

Sektor Unggulan

Dalam lingkungan daerah suatu negara, suatu komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual di pasar lokal di daerahnya sendiri, melainkan juga dapat bersaing di luar daerahnya. Pada tingkat agregat, suatu sektor atau subsektor dari suatu daerah dapat dikatakan mempunyai daya saing apabila sektor tersebut tidak hanya mampu memasok kebutuhan di daerahnya melainkan juga diluar daerahnya sendiri. Sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor basis atau unggulan (Suyanto, 2000). Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memilih permintaan yang lebih tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Suwandi, 2017). Sektor atau subsektor ekonomi unggulan yang ditetapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah atau lebih dikenal dengan sektor primer yang memiliki kriteria sebagai sektor maju dan cepat tumbuh dalam hal ini sektor atau sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dan memiliki kontribusi yang relatif besar dibandingkan dengan sektor yang sama pada level provinsi (Widodo, 2006).

Terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu: 1) sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, 2) sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, 3) sektor unggulan memiliki keterikatan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang, 4) sektor unggulan harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Rachibi, 2001). Dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB meningkat di suatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
2. Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh pada perkembangan sektor.

3. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar local, regional maupun pasar internasional.
4. Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.
5. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.
6. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut.
7. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
8. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah, baik dalam lingkup provinsi maupun nasional.

Teori pembangunan daerah yang ada sekarang ini belum mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan perekonomian daerah secara tuntas dan komprehensif. Beberapa pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu pendekatan yang selama ini dipakai antara lain analisis *location quotient* (LQ)

Analisis *location quotient*

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (*basic sector*) dan sektor mana yang bukan sektor basis (*non basic sector*). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N}$$

Keterangan :

LQ : Nilai *Location Quotient*

Si : PDRB Sektor i di daerah analisis

S : PDRB total di daerah analisis

Ni : PDRB Sektor i di daerah referensi

N : PDRB total di daerah referensi

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor). Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang *homogen* pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.

Analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Ini mengingat bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah adalah berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa dikembangkan di setiap daerah. Analisis LQ ini juga digunakan untuk menghitung potensi produk unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah/daerah basis atau non basis (Suyanto, 2000).

Pendapatan Daerah

Pendapatan regional atau daerah adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

Pendapatan Regional atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut. Yang pertama, Kenaikan atau penurunan riil, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak. Kedua, Kenaikan atau penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah di tiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat

atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk menentukan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dengan memperhitungkan unsur inflasi dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun dengan tidak memperhitungkan unsur inflasi (Jumiyanti, 2018)

PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. PDRB dengan sisi pendekatan produksi atau dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan PDRB dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut (Sasmita, 2005).

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, antara lain:

1. Pendekatan produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: 1. Pertanian,

Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industry Pengolahan; 4. Listrik, Gas dan Air Bersih; 5. Bangunan; 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7. Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Pendekatan Pendapatan,

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/entrepreneurship); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan pengeluaran,

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2. Konsumsi pemerintah, 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto, 4. Perubahan stok, dan 5. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto (Widodo, 2006).

4. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka ini seringkali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan.

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian diwilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga,

sewa tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar (Tarigan, 2005).

5. Distribusi Pendapatan dalam Pembangunan Ekonomi

Badan Riset dari Bank Dunia dan *Institute of Development Studies* dari Universitas Sussex telah mengadakan usaha bersama untuk mengadakan serentetan analisa mengenai distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang. Diantara analisa tersebut adalah analisa Ahluwalia, yang memberikan gambaran mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa Negara dan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Analisa Ahluwalia memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan relative maupun distribusi pendapatan mutlak. (Sukirno, 1985).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jika dilihat dari taraf pengambilan keputusan kesimpulan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis yang semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala atau pertanda dan keadaan sebagaimana adanya (Teguh, 2005). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada hakikatnya adalah menekankan analisis pada data *numerical* yang diolah dengan metode statistik (Azwar, 1997). Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Peneliti mengambil data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang menjadi sektor basis dan menjadi penggerak perekonomian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa data Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bireuen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data PDRB Provinsi Aceh dan PDRB Kabupaten Bireuen berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha (sektoral) dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan analisa deskriptif, yang mana untuk menggambarkan berbagai

karakteristik data, mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih, sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai bidang tertentu. Atau merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Sujarweni, 2015).

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis *location quotient* (LQ) yaitu untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bireuen.

Teknik analisis *location quotient* adalah suatu pendekatan tidak langsung untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu wilayah guna melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk ke dalam sektor unggulan (Arsyad, 2010: 390). Maka dari itu, untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Bireuen digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ digunakan sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Bireuen yang memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian serta mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Perhitungan *location quotient* (LQ) menggunakan rumus: (Tarigan, 2004: 78)

$$\text{location quotient (LQ)} = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Keterangan :

Lq = nilai *Location Quotient*

S_i = PDRB setor *i* di Kabupaten Bireuen

S = PDRB total Kabupaten Bireuen

N_i = PDRB sektor *i* di provinsi Aceh

N = PDRB total di provinsi Aceh

Berdasarkan rumus diatas maka ada 3 (tiga) kemungkinan nilai LQ yang ditemukan, yaitu:

1. Nilai LQ di sektor $i = 1$

maka hal ini berarti laju pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Bireuen adalah sama dengan laju pertumbuhan di sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Aceh.

2. Nilai LQ di sektor $i > 1$

Berarti laju pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Bireuen lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan perekonomian Provinsi Aceh.

Maka, sektor i merupakan sektor unggulan juga merupakan sektor basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Kabupaten Bireuen.

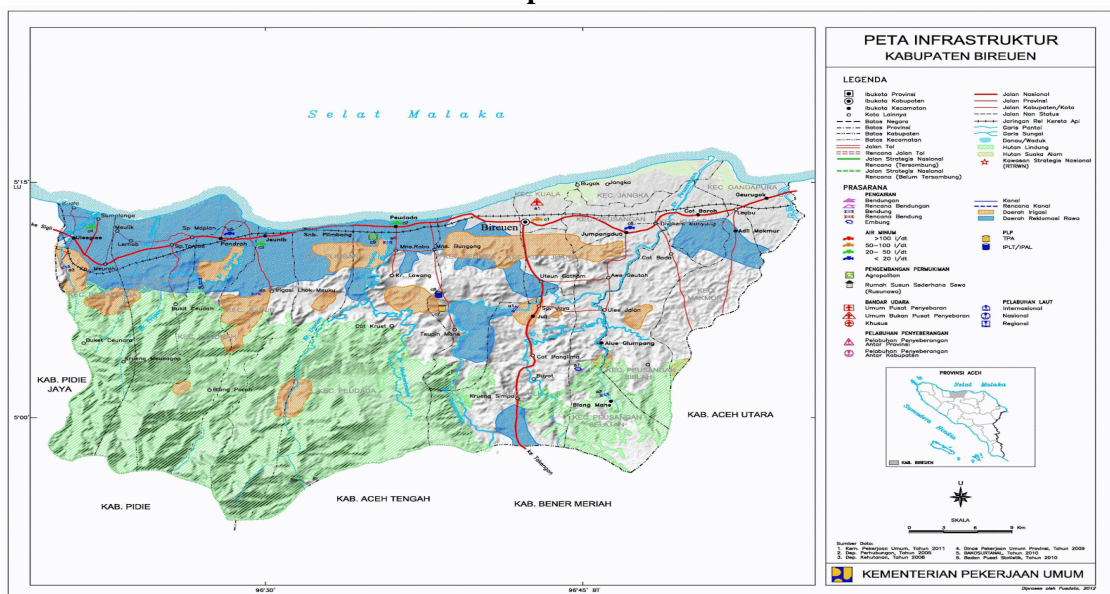
3. Nilai LQ di sektor i < 1

Hal ini berarti laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Bireuen lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Aceh. Maka, sektor i bukan merupakan sektor basis serta tidak dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Bireuen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Bireuen menjadi wilayah otonom sejak 12 oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Utara. yang pada awalnya pembentukan diatur dalam keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1957 tentang pembentukan provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 melalui Undang-Undang no 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue dalam wilayah provinsi Daerah Istimewa Aceh. Semasa Bupati Drs. H. Ramdhani Raden (1999-2002) bersama dengan DPRD Kabupaten Bireuen, menetapkan pertauran daerah tentang hari jadi yakni pada 4 Oktober 1999 (Bireuenkab.go.id)

Gambar 1
Peta Kabupaten Bireuen



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bireuen

Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Berdasarkan nilai tambah ekonomi dalam PDRB Kabupaten Bireuen dan PDRB Provinsi Aceh selama periode 2017-2021 diperoleh hasil perhitungan LQ seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Location Quotien Tahun 2017-2021

No	Sektor ekonomi	2017	2018	LQ 2019	2020	2021	Rata-rata	Keterangan
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,10	1,09	1,09	1,09	1,12	1,10	Basis
2	Pertambangan dan penggalian	0,36	0,31	0,30	0,28	0,31	0,31	Non Basis
3	Industri pengolahan	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	Non Basis
4	Pengadaan listrik dan gas	0,57	0,58	0,59	0,62	0,66	0,60	Non Basis
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,37	1,38	1,33	1,37	1,41	1,37	Basis
6	Konstruksi	0,91	0,94	0,95	0,91	0,95	0,93	Non Basis
7	Perdagangan besar dan eceran	1,62	1,67	1,69	1,69	1,74	1,68	Basis
8	Transportasi dan pergudangan	1,27	1,25	1,25	1,37	1,48	1,33	Basis
No	Sektor ekonomi	2017	2018	LQ 2019	2020	2021	Rata-rata	Keterangan
9	Peyediaan akomodasi dan makan minum	0,83	0,82	0,82	0,85	0,93	0,85	Non Basis
10	Informasi dan komunikasi	0,79	0,78	0,77	0,76	0,79	0,78	Non Basis
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,62	0,62	0,60	0,61	0,65	0,62	Non Basis
12	Real estate	0,76	0,76	0,75	0,75	0,77	0,76	Non Basis
13	Jasa perusahaan	0,45	0,45	0,44	0,47	0,49	0,46	Non Basis
14	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,86	0,87	0,88	0,90	0,92	0,88	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,69	0,68	0,66	0,66	0,68	0,67	Non Basis
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,76	0,77	0,77	0,77	0,80	0,77	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,91	0,90	0,90	0,89	0,92	0,90	Non Basis

Sumber: BPS Bireuen, tahun 2017-2021 (data diolah)

Sektor Basis (LQ > 1)

Berdasarkan hasil perhitungan *Loqation Quotient* Kabupaten Bireuen, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2021 terdapat 4 sektor yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis, dimana sektor tersebut mampu mengeksport ke wilayah lain. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bireuen memiliki lahan pertanian yang cukup luas yaitu 28.547 ha, Kabupaten Bireuen juga memiliki hutan seluas 30.679 ha, hutan produksi 32,390 ha, areal pegunungan lain yaitu 110.929 ha menempati posisi terluas kedua di Kabupaten Bireuen setelah Kabupaten Aceh

Singkil, sedangkan luas dari hutan rakyat 40 ha. Kabupaten Bireuen memiliki 7.614 nelayan dengan hasil perolehan ikan yang ditangkap sebesar 13.160.16 ton. serta banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, kehutana dan perikanan sehingga membuat sektor ini menjadi sektor basis dengan nilai LQ 1,09. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung melambat selama 5 (lima) tahun terakhir, dikarenakan di sebagian wilayah (kecamatan jangka, peusangan, kota juang, kuala, jeumpa, kutablang dan gandapura) terjadi penurunan aktivitas di sawah disebabkan perbaikan irigasi sehingga terjadi kekeringan lahan sawah, biasanya dalam setahun dapat dilakukan 3 kali tanam dan 2 kali panen, pada tahun 2021 hanya dapat dilakukan 2 kali tanam dan 1 kali panen.

Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan serta harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bireuen. Sektor ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Bireuen. Pemerintah setempat harus memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai macam masalah Petani dan nelayan serta menyediakan input untuk mengembangkan sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan di masa yang akan datang. Sektor ini harus dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar dapat memberi output yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui upaya ekstensifikasi yang berkeadilan dan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan rehabilitas kebun dan lahan kritis untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan. Intensifikasi juga perlu dilakukan supaya dapat meningkatkan produktivitas lahan serta harus ada upaya revitalisasi pertanian guna mendorong perbaikan jumlah dan mutu produksi.

Pembangunan sektor kehutanan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi, efisiensi dan nilai tambah serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk pengembangan kawasan usaha tani secara komperhensif dan terpadu dengan mengembangkan komoditas unggulan lokal. Untuk mengembangkan subkategori perikanan, maka perlu adanya daya dorong keterpaduan konektifitas yang mampu mempercepat lajunya pertumbuhan. Pengembangan industrialisasi melalui subkategori kelautan dan perikanan harus difokuskan pada penanganan hasil tangkapan maupun budidaya dengan beberapa kebutuhan, diantaranya adalah: ruang penyimpanan ikan (*cool room*), sarana pengolahan hasil tangkapan/ budidaya (sistem penjemuran rumah kaca) serta pabrik pembuat tepung ikan serta pabrik pakan ikan. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pengelolaan potensi sumber daya alam sehingga dapat saling menguntungkan semua pihak. Langkah-lagkah seperti ini harus menjadi

bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan tercantum secara jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Sektor ini termasuk kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui saluran pipa untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga pengumpulan, penjernihan serta pengolahan air sungai dan danau, mata air, hujan dan lain-lain. termasuk ke dalam sektor basis dengan koefisien 1,36 yang berarti sektor ini bisa ditingkatkan dan dapat dipertahankan dengan baik oleh pemerintah di Kabupaten Bireuen. Dikarenakan di Kabupaten Bireuen sangat banyak pelanggan air minum PDAM. Jumlah pelanggan air minum PDAM di Kabupaten Bireuen sebanyak 25.909 pelanggan. Pelanggan terbesar berasal dari pengguna rumah tangga dengan persentase 88 persen pelanggan aktif. Pelanggan air terbanyak berasal dari Kecamatan Jeunib yaitu sejumlah 3.334 pelanggan dengan volume air yang disalurkan sejumlah 595.106 m kubik yang bernilai 1.875.824 rupiah.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran meliputi reparasi mobil dan sepeda motor, menjadi sektor basis dengan nilai tertinggi yaitu 1,67. sektor ini sangat prospek jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dikarenakan di Kabupaten Saat ini terdapat 417 perusahaan dengan badan hukum PT, CV/Firma dan perseorangan yang sudah terdaftar di dinas penanaman modal, perdagangan, koperasi dan ukm Kabupaten Bireuen. Jumlah pasar tradisional sebanyak 56 pasar. Toko di Kabupaten Bireuen berjumlah 1.763, dan kios berjumlah 2.988. kemudian warung berjumlah 600 unit. Unit usaha industri kecil formal yang ada di Kabupaten Bireuen berjumlah 451 unit, dan 3.125 unit usaha non formal. Jenis industri makanan, minuman, dan tembakau dapat menyerap tenaga kerja sebesar 44,78 persen. sektor ini cenderung meningkat selama periode tahun 2017-2019 dan mengalami kontraksi selama tahun 2020 dikarenakan faktor covid, lalu pada tahun 2021 PDRB kembali meningkat.

Dengan banyaknya dan berbagai jenis transportasi di Kabupaten Bireuen Sektor Transportasi dan pergudangan mampu memberikan kontribusi besar kepada perekonomian di Kabupaten Bireuen dengan nilai LQ 1,31 serta dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Jumlah kendaraan antar desa di Kabupaten Bireuen berjumlah 33 unit. Sedangkan jumlah kendaraan penumpang antar kota sebanyak 134 unit. Kendaraan yang paling banyak di Kabupten Bireuen adalah kendaraan beroda dua, yaitu berjumlah 98.565 unit. Kemudian kendaraan terbanyak selanjutnya adalah minibus dan pick up masing-masing 6.901 dan 4.737 unit. Sektor ini mampu memberikan kontribusi besar, namun pada tahun 2020 mengalami

kontraksi dikarenakan pembatasan sosial karena pandemic covid-19 dan juga adanya larangan mudik saat lebaran dan hari libur lainnya, pada tahun 2021 sektor ini kembali membaik.

a. Sektor Non Basis ($LQ < 1$)

Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ yang disajikan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat tiga belas (13) sektor non basis di Kabupaten Bireuen yaitu, sektor Pertambangan dan penggalian; sektor Industri pengolahan; sektor Pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor Informasi dan komunikasi; sektor Jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor Jasa pendidikan; sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor tersebut di Kabupaten Bireuen belum mampu memenuhi sendiri kebutuhannya dan dimungkinkan untuk mengimpor dari luar daerah.

Sektor Pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan nilai LQ terkecil, hal ini terjadi karena di sektor pertambangan dan penggalian dirinci menjadi 4 (empat) subkategori yaitu: subkategori pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, subkategori pertambangan batubara dan lignit, subkategori pertambangan bijih logam, dan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Bireuen hanya ada subkategori yang terakhir.

Rendahnya nilai LQ untuk 13 sektor di Kabupaten Bireuen memberi pesan bahwa perlu adanya evaluasi kebijakan yang tepat dan harus memperhatikan kembali 13 sektor yang belum menjadi sektor basis melalui akselerasi berbagai program dan kegiatan yang tepat serta penganggaran pembangunan yang memadai supaya dapat dikembangkan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor basis (Unggulan) dan non basis (non unggulan) di Kabupaten Bireuen adalah:

- a. Sektor basis meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor perdagangan besar dan eceran; serta sektor transportasi dan pergudangan.
- b. Sektor non basis meliputi sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan;

sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya.

Saran

Dalam upaya meningkatkan PDRB Kabupaten Bireuen diharapkan pemerintah daerah agar lebih mengutamakan pengembangan sektor basis serta tidak mengabaikan sektor non basis. dalam perancangan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor Perdagangan besar dan eceran, dan sektor Transportasi Dan Pergudangan merupakan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bireuen karena tergolong kedalam sektor basis, sehingga perlu mendapatkan prioritas pengembangan dari pengambil kebijakan daerah.

Peran sektor unggulan Agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen. Peran sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor Perdagangan besar dan eceran dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bireuen sangatlah besar, maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bireuen harus mampu menjaga dan meningkatkannya. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Bireuen sebaiknya mulai meningkatkan sektor-sektor perekonomian lainnya. Dengan demikian, semua sektor di Kabupaten Bireuen mampu memberikan kontribusi lebih untuk PDRB Kabupaten Bireuen, serta tidak berpangku tangan pada sektor yang unggulan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R.(2005).*Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Arsyad, L. (2002). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonom Daerah*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP

Azwar, S. (1997), *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

BPS. (2017-2021). *PBDR Se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Aceh Dalam Angka*

BPS. (2022-2021). *PDBR ADHK Kabupaten Bireuen Bireuen Dalam Angka*

<https://bireuenkab.go.id/halaman/sejarah#>

Jumiyanti, K.R. (2018). Analisis Location Quotient Dalam Penentuan Sektor Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review* 1 (1): 29-43

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Arah Pemulihan Ekonomi Semakin Kuat di Awal 2022 Akan Terus Dijaga*

- Rachibini, D.J. (2001). *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sasmita, R.A. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sirojuzilam. (2010). *Regional, Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press
- Sjafrijal, (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Sjafrijal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Bduose Media
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukirno, S. (2015). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI Bima Grafika
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Suwandi. (2017). *Desentralisasi Fiscal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish
- Suyanto. (2000). Analisis Ekonomi Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan UMS*
- Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional / Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tarigan, R (2014) *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Todaro, M. (2001). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, P.M. (2010). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (2004). Otonominasi Daerah
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN &